
Studi Komparasi Kebijakan Pendidikan dan Pengembangannya di Indonesia

Octa Romadhona Putri*, Maila Rosidah, Rahmawati, Saipul An-Nur, Ade Rosad

Program Manajemen Pendidikan Islam, FITK, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan, Jl. KH.Zainal Abidin Fikri, K.M. 3,5 Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

*Corresponding Author: octaromadhonaputri94@gmail.com

Article History

Received : April 07th, 2026

Revised : April 27th, 2026

Accepted : May 14th, 2026

Abstract: Komparasi kebijakan pendidikan dan pengembangannya di Indonesia sangat penting untuk memajukan bidang pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk memahami evolusi kebijakan pendidikan dalam konteks perubahan politik dan sosial di Indonesia pada era orde baru, reformasi, dan era modern. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Data dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan Orde Baru cenderung sentralistik dengan fokus pada stabilitas dan kontrol, sementara era Reformasi membuka ruang desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Pada era Modern, terdapat upaya peningkatan kualitas melalui inovasi teknologi dan kebijakan yang adaptif terhadap globalisasi. Kesimpulan penelitian ini adalah kebijakan pendidikan di Indonesia mengalami perbedaan dari setiap periode, baik dari orde lama, orde baru, sampai kepada periode modern.

Keywords: Indonesia, kebijakan; komparasi; pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah pilar penting dalam pembangunan negara dan kemajuan peradaban manusia (Puspitoningrum et al., 2024). Dalam proses pendidikan, individu dididik untuk berpikir kritis, bermoral, dan beradaptasi dengan perubahan sosial (Arsyad & Sauri, 2024). Pendidikan adalah proses pembudayaan dalam memberi pengetahuan dan mendidik individu untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai manusia, moral, dan spiritual, serta berbudaya tinggi dan berkepribadian (Asiah et al., 2024).

Pendidikan di Indonesia sebagai Negara berkembang mengalami permasalahan terutama dalam kompleksitas kurikulum yang berlaku (Saidah & Imron, 2022), sehingga menghambat dalam implementasi program yang telah dibuat. Beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti, sejarah, budaya, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, kajian perbandingan sistem pendidikan menjadi sangat penting untuk memahami perbedaan dan persamaan antara negara dalam manajemen pendidikan (Syakhrani et al., 2022).

Salah satu manfaatnya yaitu untuk memahami apakah proses sistem pendidikan telah berfungsi dalam berbagai situasi. Pendidikan komparatif bertujuan untuk menemukan, pola, prinsip, dan elemen yang memengaruhi

keberhasilan pendidikan di suatu negara. Hal tersebut memungkinkan pembelajaran kebijakan dan praktik pendidikan lintas budaya. Metode ini memungkinkan peneliti dan pembuat kebijakan menerapkan praktik pendidikan di negara lain secara kontekstual. Akibatnya, pendidikan komparatif digunakan sebagai alat strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.(Noah, H. J., & Eckstein, 2020).

Kajian komparatif semakin penting di era globalisasi mengingat lebih banyak informasi dan praktik pendidikan dapat ditukar antar Negara secara cepat dan mudah. Hal tersebut tidak hanya mengubah arah pendidikan, tetapi juga memberi negara berkembang seperti Indonesia kesempatan untuk belajar dari sistem pendidikan negara maju seperti Finlandia dan Jepang terutama dalam hal pembelajaran, pelatihan guru, dan evaluasi pendidikan (Rizvi, F., & Lingard, 2021). Seorang pakar penting dalam bidang ini, George Z. F. Bereday, menyatakan bahwa metodologi komparatif terdiri dari empat tahap utama: deskripsi, interpretasi, juxtaposisi, dan komparasi.

Metodologi komparatif kontemporer memerlukan pendekatan interdisipliner dengan menggabungkan elemen sosial, ekonomi, dan politik untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap tentang sistem pendidikan. Kajian komparatif telah berkembang dari pendekatan deskriptif ke pendekatan empiris berbasis data

global seiring kemajuan ilmu sosial dan teknologi (Altbach, P. G., & Kelly, 2019).

Di Indonesia, studi komparatif semakin penting untuk mendukung reformasi pendidikan nasional, seperti yang ditunjukkan oleh kebijakan "Merdeka Belajar", yang mengambil inspirasi dari model pendidikan humanistik dan kolaboratif Finlandia. Implementasi kebijakan tidak dapat dilakukan secara imitasi; sebaliknya, perlu mempertimbangkan keadaan sosial dan budaya lokal (Lloyd, R., & Aho, 2020). Studi komparatif memiliki potensi besar, tetapi juga menghadapi masalah seperti bias peneliti, perbedaan konteks budaya, dan keterbatasan data. Kemajuan teknologi informasi saat ini memungkinkan pemanfaatan big data dan kolaborasi internasional untuk membuat penelitian komparatif lebih terbuka, kolaboratif, dan berbasis bukti.

Kajian komparatif tidak hanya membantu menganalisis perbedaan di antara sistem pendidikan, tetapi juga membantu memperkaya wawasan lokal dengan memberikan perspektif global yang kritis dan kontekstual. Pembuat kebijakan dapat menggunakan pendekatan komparatif untuk membuat strategi pendidikan yang dapat disesuaikan dengan zaman sambil mempertahankan identitas budaya dan prinsip nasional (An-nur, 2023).

Metodologi komparasi pendidikan membantu memperkaya wawasan akademik dan mendorong inovasi kebijakan. Studi ini tidak hanya melakukan perbandingan tetapi juga mencari solusi untuk masalah pendidikan di seluruh dunia dan di negara masing-masing. Dalam menghadapi kompleksitas era globalisasi, pengembangan metodologi komparatif yang adaptif, interdisipliner, dan berbasis bukti akan sangat dibutuhkan ke depan (Azra, 2020). Artikel ini akan membahas pengertian, tujuan, metodologi, perkembangan, dan contoh penerapan metodologi komparasi pendidikan. Ini juga akan membahas tantangan dan prospek pengembangan metodologi ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi pustaka (*library research*) yakni memahami, dan menganalisis konsep teoretis, metode, perkembangan, dan implementasi komparatif pendidikan melalui sumber-sumber ilmiah yang relevan (Yusuf, 2017). Studi komparasi dilakukan dengan cara membandingkan antara kondisi objektif pendidikan melalui temuan penelitian

sebelumnya dan beberapa literatur yang relevan. Penelitian ini berlangsung pada semester ganjil tahun 2025 dengan wilayah kajian Indonesia. Subjek penelitian ini adalah kebijakan pendidikan di Indonesia. Objek yang menjadi bahan perbandingan dibatasi pada tiga fase kurikulum di Indonesia, yaitu orde baru, reformasi dan modern. Prosedur penelitian ini dilakukan secara bertahap, dimulai mengumpulkan materi kurikulum pada masa orde baru, reformasi dan modern, kemudian mencari dan meninjau beberapa artikel yang membahas kebijakan dan pengembangan pendidikan di Indonesia dari tiga fase tersebut melalui studi literatur. Setelah ditinjau kemudian dianalisis dan disimpulkan. Peneliti menemukan tema-tema utama terkait komparasi pendidikan melalui literatur yang relevan, serta data secara sistematis supaya menggambarkan temuan utama. Kesimpulan dibuat untuk menjawab topik penelitian dan mengaitkannya dengan kemajuan metodologi komparatif dalam penelitian pendidikan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif Miller dengan cara pengumpulan data, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji kebijakan kurikulum pendidikan dalam tiga periode, yaitu orde baru, reformasi, dan era modern. Data hasil penelitian didapatkan dari penelusuran beberapa literatur berupa jurnal, baik primer maupun sekunder. Ruang lingkup komparasi pendidikan meliputi analisis terhadap aspek: (a) Struktur sistem pendidikan, (b) kurikulum dan pedagogi, (c) kebijakan pendidikan, (d) peran lembaga pendidikan, dan (e) hasil pendidikan dan dampaknya terhadap pembangunan masyarakat (Ahmad & Andriansyah Junaid, 2022).

Studi komparasi pendidikan terdiri dari empat tahapan utama, yaitu dimulai dengan mengumpulkan dan menyajikan data faktual dari sistem pendidikan yang dikaji. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara mendalam dengan melihat konteks sosial dan budaya untuk memberikan interpretasi yang tepat. Setelah itu, hasil analisis temuan disandingkan melalui proses penjabaran guna mengidentifikasi kesenjangan dan kesamaan antar sistem pendidikan. Tahap akhir adalah melakukan perbandingan untuk menarik kesimpulan yang dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan relevan. Tahapan ini perlu diperkaya dengan pendekatan interdisipliner dan

dukungan data internasional, seperti hasil tes PISA dan UNESCO Global Education Monitoring Report (Bray, M., Adamson, B., & Mason, 2022).

Pembahasan

Kebijakan pendidikan merupakan sebuah upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengatur sistem pendidikan guna mencapai hasil yang optimal, meliputi perencanaan, pembiayaan, kurikulum, standar, dan pengelolaan sumber daya manusia (Aprianti & Maulia, 2023). Melalui kebijakan yang diambil, tujuan pendidikan yang berkualitas, akses yang luas, arah tujuan dan pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat dapat diwujudkan (Yuliah, 2020). Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk memajukan pendidikan Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga era modern ini. Setidaknya dalam kurikulum telah mengupayakan hingga 11 kali pergantian kurikulum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (Aprianti & Maulia, 2023).

1. Kebijakan Pendidikan di Era Orde Baru

Era Orde Baru di mulai tahun 1969-1998, merupakan pergantian dari orde lama dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Kebijakan pendidikan pada masa ini berupaya memajukan sekolah-sekolah formal dan juga berkembang pendidikan Islam yaitu madrasah tahun 1975. Kebijakan wajib belajar yang diterapkana dalah 6 tahun (Nazifa et al., 2025). Pada tahun 1994 pemerintah mengambil kebijakan untuk wajib belajar pada seluruh warga Negara Indonesia dari 6 tahun berubah menjadi 9 tahun dengan berfokus pada pemerataan akses dan pembangunan ribuan SD Inpres, serta kampanye Kejar Paksa untuk mengurangi buta huruf (Berliana et al., 2022). Selain itu, juga diterapkan pendekatan sentralistik yang kuat dan indoktrinasi ideologi Pancasila melalui P4 serta KKN untuk menjaga stabilitas politik. Kelemahan pada masa ini kualitas pendidikan rendah dan akses perguruan tinggi dibatasi bagi konsistensi.

2. Kebijakan Pendidikan di Era Reformasi

Pada era reformasi yaitu tahun 1998-2014 kebijakan pendidikan bergeser kepada desentralisasi melalui otonomi daerah, penghapusan NKK/BKK untuk kebebasan kampus, beasiswa SPP gratis SD-SMTA, serta profesionalisasi guru melalui Undang-Undang No.14/2005. Wajib belajar diganti dari wajib belajar 9 tahun menjadi 12 tahun. Reformasi pendidikan penting dilakukan untuk

menyesuaikan dengan kebutuhan zaman (M. Zuhriansah, 2025). Kurikulum yang berlaku pada periode ini ada dua yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang berbasis standar nasional untuk pengembangan individu peserta didik, sehingga meningkatkan sarana dan kualitas guru (Wyandha et al., 2023).. Selain itu, kebijakan memberikan kebebasan kepada guru untuk mengatur kegiatan belajar sesuai dengan lingkungannya masing-masing (Aprianti & Maulia, 2023). KTSP kemudian diganti dengan kurikulum 2013. Pada masa ini, metode pembelajaran di arahkan pada metode pembelajaran mandiri dan berbasis proyek, Kurikulum 2013 mengembangkan dan memperkuat kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berimbang. (Nurholis et al., 2022). Kelemahan kebijakan dalam periode ini masih terjadi disparitas antar daerah.

3. Kebijakan Pendidikan di Era Modern

Pada era modern, sebagai tindak lanjut reformasi pasca Covid 2019 pendidikan di Indonesia, mengalami perubahan dengan berlakunya Kurikulum Merdeka. Pada kurikulum ini lebih fleksibel, prioritas literasi dasar, pelatihan guru kontekstual, serta sinergi pusat-daerah-industri untuk menghadapi Society 5.0, dengan reformasi lintas sektor guna menghubungkan pendidikan ke dunia kerja dan mengatasi disrupsi digital (Astuti et al., 2024). Pada Kurikulum Merdeka kebijakan pendidikan di Indonesia mengarahkan peserta didik aktif, kreatif dan inovatif untuk menyesuaikan dengan kemajuan dalam bidang teknologi di dunia. pendidikan diarahkan pada kegiatan yang fokus pada peserta didik, berbasis proyek, dan pendidikan karakter, sementara guru sebagai fasilitator. Metode pembelajaran yang berlaku disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik menghadapi tantangan global, penggunaan media pembelajaran modern yang mengintegrasikan pendidikan dengan teknologi, misalnya menggunakan media podcast dalam pembelajaran (Astuti et al., 2025).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa fokus kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru, adalah pemerataan akses melalui program wajib belajar 9 tahun dan pengentasan buta huruf, dengan pendekatan sentralistik dan indoktrinasi ideologi Pancasila. Sistem pendidikan pada periode ini menitikberatkan pada kuantitas dan cakupan, sehingga kualitas dan kreativitas kurang mendapat perhatian. Pada era Reformasi, terjadi desentralisasi pendidikan dengan pemberian

otonomi kepada daerah melalui UU 22/1999, serta kebebasan pendanaan seperti penghapusan NKK/BKK dan peningkatan peran BOS dan manajemen berbasis sekolah (MBS). Kebijakan ini memberi peluang bagi daerah untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan lokal dan memberi ruang demokratisasi di dunia pendidikan, meskipun ketimpangan kualitas antar daerah masih menjadi masalah. Di era modern, kebijakan fokus pada inovasi dengan penerapan Kurikulum Merdeka, penguatan kompetensi abad 21, digitalisasi pendidikan, serta program-program peningkatan kualitas dan inklusi seperti Sekolah Rakyat dan layar pintar. Tekanan pada kualitas, teknologi, dan kesetaraan akses menjadi prioritas utama sebagai persiapan menyambut Generasi Emas 2045.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia mengalami transformasi dari masa Orde Baru, Reformasi, hingga era modern. Kebijakan pendidikan Indonesia mencerminkan perubahan dari kontrol dan indoktrinasi menuju otonomi dan inovasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil yang disimpulkan disarankan kepada praktisi pendidikan, baik guru, waka kurikulum, kepala sekolah, maupun pemerintah khususnya pengembang kurikulum untuk mempertimbangkan pendekatan yang tepat, melalui hasil studi komparasi pendidikan sebagai alternatif mengambil keputusan dalam mengembangkan kebijakan pendidikan yang berbasis bukti dan mampu memperkuat sistem pendidikan nasional di tengah dinamika global.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada para akademisi terutama dosen pengampu mata kuliah Studi Komparasi Pendidikan yang telah memberikan masukan konstruktif selama Proses penulisan artikel ini, serta rekan-rekan author (mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam) yang telah bekerjasama dalam menyelesaikan tulisan ini. Apresiasi khusus diberikan kepada pihak yang telah menyediakan sumber literatur yang mendukung kelengkapan kajian ini.

REFERENSI

- Ahmad & Andriansyah Junaid. (2022). Komparasi Konsep Pendidikan Sekolah, Keluarga, Dan Masyarakat. *Journal of Islamic Studies, Vol. 4 No.*
- Altbach, P. G., & Kelly, G. P. (2019). *Comparative Education*. Springer.
- An-nur, S. (2023). Pendidikan Komparatif dalam Perspektif Islam dan Globalisasi. In *UIN Raden Fatah Press*. UIN Raden Fatah Press.
- Aprianti, A., & Maulia, S. T. (2023). Kebijakan Pendidikan : Dampak Kebijakan Perubahan Kurikulum Pendidikan Bagi Guru dan Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Dan Sastra Inggris*, 3(1), 181–190. <https://doi.org/10.55606/jupensi.v3i1.1507>
- Arsyad, H., & Sauri, S. (2024). Landasan Filosofi Pendidikan dan Konsep Mendidik. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(3), 1585–1596. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i3.2579>
- Asiah, M. R., Jamaludin, U., & Leksono, S. M. (2024). Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Pada Tema Kearifan Lokal Kabupaten Tangerang untuk Mewujudkan Peserta Didik yang Memiliki Karakter Profil Pelajar Pancasila. *Naturalistic: Jurnal Kajian Penelitian Dan Pendidikan Dan Pembelajaran*, 9(1), 403–411.
- Astuti, M., Ismail, F., Dewi, M., Oviyanti, F., & Yuniar. (2025). Relevance of Podcast-Based Cooperative Methods in Learning Islamic Religious Education in The Digital Era. *Eurasian Journal of Educational Research*, 116, 75–86. <https://doi.org/10.14689/ejer.2025.116.05>
- Astuti, M., Ismail, F., Fatimah, S., Puspita, W., & Herlina. (2024). The Relevance Of The Merdeka Curriculum In Improving The Quality Of Islamic Education In Indonesia. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 23(6), 56–72. <https://doi.org/10.26803/ijlter.23.6.3>
- Azra, A. (2020). *Membebaskan Pendidikan Islam* (I. Thaha (ed.)). Kencana.
- Berliana, R., F, R. M., & Putra, R. D. A. (2022). Pengaruh Wajib Belajar Sembilan Tahun Terhadap Pendapatan: Studi Kasus Indonesia. *Prosiding Hero*, 2022. <https://prosiding.umy.ac.id/hero/index.php/hero/article/download/9/8>

- Bray, M., Adamson, B., & Mason, M. (2022). *Comparative Education Research: Approaches and Methods (3rd ed.)*. CERC/Springer.
- Lloyd, R., & Aho, W. (2020). *The four functions of management: An essential guide to management principles*. Fort Hays State University Press.
- M. Zuhriansah. (2025). Modernisasi Pendidikan Perspektif Azyumardi Azra dan Aplikasinya dalam Pendidikan Islam. *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 45–66. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i2.884>
- Nazifa, M. N., Asmuri, A., & Afandi, I. (2025). Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Orde Baru. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 6(1), 60–67. <https://doi.org/10.54371/ainj.v6i1.745>
- Noah, H. J., & Eckstein, M. A. (2020). Toward a Science of Comparative Education (Revised ed.). In *Routledge*. Routledge.
- Nurholis, D., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Analisis Kebijakan Kurikulum 2013. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 9(1), 98–114.
- Puspitoningrum, E., Resya, K. N. P., Syamsuri, S., Pratiwi, E. Y. R., & Mere, K. (2024). Penerapan E-Learning Sebagai Sumber dan Media Belajar pada Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 8(1), 197. <https://doi.org/10.35931/am.v8i1.2912>
- Rizvi, F., & Lingard, B. (2021). *Globalizing Education Policy*. Routledge.
- Saidah, K., & Imron, I. F. (2022). Implementation of the Operational Curriculum of Sekolah Penggerak Program At Elementary Schools. *PEDAGOGIK: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 68–81. <https://doi.org/10.33650/pjp.v9i1.3557>
- Syakhrani, A. W., Enjelina, Putri, H. I., Rasidah, J., & Bolqiah, N. (2022). Perbandingan Pendidikan. *Educatioanl Journal: General and Specific Research*, 2(3), 419–432.
- Wyandha, B., Purnama, E. D., Primaridha, M. R., & Damariswara, R. (2023). Analisis Pembelajaran Kurikulum Merdeka Di Sdn Plosokidul. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 14(01), 53–66. <https://doi.org/10.21009/jpd.v14i01.36809>
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Kencana.